

BAB VI KESIMPULAN

VI.I Kesimpulan

Senjata nuklir adalah senjata yang sangat berbahaya bagi manusia, selain karena kapasitas kekuatannya sangat besar, cakupan wilayah yang terkena dampaknya pun juga luas. Lalu ada yang namanya proliferasi nuklir. Proliferasi nuklir adalah penyebaran senjata dan sistem senjata ke negara-negara yang tidak memiliki senjata atau sistem persenjataan tersebut (proliferasi horizontal) atau akumulasi senjata dan sistem senjata yang semakin besar di suatu negara (proliferasi vertikal). Hal ini membuat banyak negara yang setuju untuk membuat sebuah organisasi internasional yang mengatur pergerakan senjata nuklir di dunia yang disebut juga *Non Proliferation Treaty* atau NPT.

Adapun tiga pilar utama yang dihasilkan oleh NPT adalah perjanjian nonproliferasi yang isinya hanya memperbolehkan lima negara yang memiliki nuklir secara resmi yaitu Perancis, Tiongkok, Uni Soviet—sekarang berubah menjadi Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat. Yang kedua adalah perlucutan senjata nuklir yang dimiliki oleh negara selain lima negara yang sudah ditentukan. Dan yang terakhir adalah hak untuk menggunakan teknologi nuklir untuk kepentingan damai.

Namun ada satu negara yang enggan setuju dengan isi dari NPT, yaitu Korea Utara. Sudah lebih dari beberapa dekade, Korea Utara tetap mengembangkan fasilitas nuklirnya. Awalnya mereka dibantu oleh Uni Soviet dalam rangka pertahanan negara dalam Perang Saudara di Korea dengan Korea Selatan yang mendapat sokongan pertahanan dari Amerika Serikat. Berhubung

pada saat Perang Saudara di Korea pecah sudah masuk ke era Perang Dingin, maka Uni Soviet secara besar-besaran membantu masyarakat Korea Utara untuk mempertahankan kedaulatannya dengan cara entah memberikan bantuan secara cuma-cuma atau juga dengan mengedukasi beberapa masyarakat Korea Utara untuk membuat senjata nuklir.

Amerika Serikat, sebagai negara adidaya yang merasa semua masalah keamanan dunia adalah masalah mereka juga dan mereka harus ikut serta, berusaha untuk menekan Korea Utara agar Korea Utara tidak lagi mengembangkan dan menjalankan program nuklirnya. Amerika Serikat beranggapan bahwa sekecil apapun perkembangan yang dimiliki oleh Korea Utara adalah sebuah ancaman. Ditambah, ada dua aliansi setia Amerika Serikat yang berlokasi di dekat Korea Utara, yaitu Jepang dan Korea Selatan.

Seiring berjalannya waktu, masalah nuklir di Korea Utara semakin menjadi masalah yang tinggi urgensinya untuk diselesaikan. Banyak kepala negara Amerika Serikat yang telah berusaha untuk meyakinkan atau membuat Korea Utara melakukan denuklirisasi, salah satunya adalah Presiden Barack Obama. Presiden Obama adalah presiden Amerika Serikat ke-44. Beliau memasuki *White House* pertama kali pada tahun 2009 dan mendapat kepercayaan lagi untuk melanjutkan jabatannya pada tahun 2013 sampai dengan 2017.

Setiap presiden yang diamanahkan untuk mengatur jalannya laju pemerintahan di Amerika Serikat, Presiden Obama tentu juga punya caranya tersendiri. Ia memiliki kebijakan yang bersifat sangat liberal dan tidak ofensif. Hal ini dia ambil karena belajar dari kesalahan presiden terdahulu Amerika Serikat yaitu Presiden Bush karena telah merugikan Amerika Serikat baik dari segi materil maupun sumber daya manusianya karena terlalu agresif dengan ancaman keamanan internasional.

Selain karena Presiden Obama belajar dari pengalaman pemimpin terdahulu, ia juga besar dari lingkungan Partai Demokrat. Partai Demokrat ini terkenal dengan kebijakan dan cara pandangnya yang liberal. Bahkan saking liberalnya, mereka beranggapan bahwa perang itu tidak diperlukan karena mereka yakin bahwa Amerika Serikat akan kehilangan banyak aspek kehidupan. Yang diperlukan oleh Amerika Serikat menurut pandangan Partai Demokrat adalah hubungan atau kerjasama ekonomi dan diplomasi.

Walaupun Presiden Obama adalah seorang yang memandang dunia dengan perspektif liberal, namun ia juga bisa menjadi realistis. Ia sadar, pasti akan ada banyak pihak yang membelot dari peraturan dan norma internasional yang sudah dibuat sedemikian rupa agar menjaga kestabilan internasional, contohnya Korea Utara. Ia merasa Korea Utara adalah pengganggu tatanan internasional karena memiliki senjata nuklir yang seharusnya mereka tidak miliki.

Oleh karena itu, Presiden Obama memiliki sebuah kebijakan tersendiri dalam rangka menangani nuklir Korea Utara yang biasa disebutnya dengan *strategic patience*. Kebijakan ini adalah kebijakan yang sangat mengedepankan pertemuan bilateral/ multilateral, diplomasi ketimbang harus gencatan senjata atau sampai perang. Kebijakan ini digambarkan sebagai Amerika Serikat yang tidak agresif, mengedepankan hubungan luar negeri yang baik dengan Korea Utara di kedepannya karena tidak memilih jalur perang karena merasa kalau damai tapi karena paksaan, akan ada kemungkinan untuk Korea Utara membelot lagi.

Sesuai dengan cara pandang Presiden Obama, kebijakan *strategic patience* Amerika Serikat ditafsirkan berasal dari perpaduan pemikiran realis internasionalis dan liberalis. Tujuan kebijakannya adalah untuk mencapai denuklirisasi yang dapat diverifikasi oleh Korea Utara itu sendiri melalui

diplomasi multilateral yaitu *Six Party Talks*. Jika Korea Utara setuju untuk membongkar program nuklirnya dan kembali ke NPT, kelima pihak akan setuju untuk memberi jaminan akan tidak adanya serangan dari Amerika Serikat terhadap Korea Utara, normalisasi hubungan dengan Amerika Serikat dan Jepang, dan negosiasi untuk rezim perdamaian secara permanen di Semenanjung Korea.

Langkah dari kebijakan ini dianalisa terbagi menjadi empat cara, yaitu ada *explicit acquiescence*, *manage and contain*, *rollback*, dan *regime change*. Dari keempat cara ini, sebagian besar meyakini bahwa *strategic patience* menjalankan cara *manage and contain*. Namun juga ada yang berargumen bahwa kebijakan ini dijalankan dengan cara *rollback*.

Untuk *explicit acquiescence* dan *regime change* tidak dilakukan oleh Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan kedua langkah tersebut malah merugikan atau bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang diusung oleh Presiden Obama. Walaupun begitu, bukan tidak mungkin untuk Amerika Serikat menjalankan kedua langkah tersebut.

Pengambilan kebijakan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor dari level analisa. Yang pertama adalah aktor, yang dimana menjadi faktor bahwa pemimpin Amerika Serikat pada saat itu adalah seorang liberalis. Yang kedua adalah *think tank* level nasional yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan dalam dan luar negeri yang juga bersifat liberal. Dan yang terakhir adalah sistem internasional yang memperlihatkan kepada masyarakat lain apakah kebijakan ini dapat mempengaruhi negara lain, terutama negara-negara tetangga dari wilayah yang memiliki konflik—Korea Utara dengan fokus region Asia Timur.

Namun pada 8 tahun pemerintahan Presiden Obama, banyak pihak yang menilai kalau Presiden Obama tidak kompeten dalam menangani masalah nuklir Korea Utara. Karena ketika *strategic patience* dijalankan, secara bersamaan Korea Utara juga melanjutkan program nuklir mereka. Bahkan mereka sempat dua kali melakukan uji coba nuklir yang getaran gempanya terdeteksi hingga ke Jepang.

Selain itu, sanksi yang dicanangkan oleh Amerika Serikat lewat Dewan Keamanan PBB atau instansi internasional lainnya tidak diindahkan oleh Korea Utara. Mereka tetap melanjutkan program nuklir mereka. Pada dasarnya, mereka melanjutkan program nuklir ini karena beranggapan bahwa Amerika Serikat dan aliansinya adalah sebuah ancaman yang nyata, oleh karena itu mereka mengembangkan dan memajukan program nuklir ini. Mereka juga memperlihatkan dari banyaknya PDB yang difungsikan untuk program pengembangan senjata ini, bahkan di tahun 2015 mereka memisahkan 20% PDB nya hanya untuk nuklir.

Karena Amerika Serikat mengambil kebijakan seperti *strategic patience*, seakan-akan Amerika Serikat tidak mampu untuk membendung kekuatan dari Korea Utara. Selain itu, mereka terlihat lepas tanggung jawab karena terlihat kalau mereka memaksa Tiongkok untuk bertanggung jawab atas kelakuan Korea Utara. Karena pada dasarnya, Amerika Serikat hanya menunggu dan menunggu untuk Korea Utara sadar dan melakukan denuklirisasi atas dasar kemauan mereka sendiri.

Amerika Serikat juga terkesan kalau mereka percaya bahwa Tiongkok bisa melakukan itu semua. Padahal, Tiongkok lebih ingin stabilitas regional ketimbang dengan denuklirisasi Korea Utara yang bisa saja berakibat perang di kawasan Asia Timur. Terlebih, hampir semua diplomat Tiongkok yang pernah ditugaskan di Korea Utara tidak pernah menyebut kalau Korea Utara adalah

sekutu dari Tiongkok. Mereka melakukan aktivitas hubungan luar negeri selayaknya negara lain yang hanya mementingkan peran ekonominya.

Strategic patience dinilai hanya memperburuk kualitas informasi program nuklir Korea Utara dan niatan mereka untuk mengakhiri program nuklirnya. *Strategic patience* juga tidak memperlihatkan keterlibatan yang memiliki dampak dengan Korea Utara baik dalam rangka memastikan bahwa Korea Utara menyadari komitmen besar dari Amerika Serikat dan sekutunya untuk melakukan denuklirisasi secara damai, atau untuk memverifikasi seperti apa akhir yang dibayangkan oleh Korea Utara untuk menghentikan pengembangan program nuklirnya.

Sampai dengan Presiden Obama meninggalkan *White House*, *strategic patience* dinilai tidak efektif untuk menangani nuklir Korea Utara. Kebijakan ini pada akhirnya hanya membuat regional panik dan bisa memicu *arms race* karena Amerika Serikat menaikkan jumlah personel tentaranya di Jepang dan Korea Selatan. Keputusan ini membuat Tiongkok dan Rusia juga menaikkan intensitas latihan gabungan mereka di perbatasan Sino-Rusia.

VI.II Saran

Upaya Korea Utara untuk mendapatkan pengakuan internasional sebagai negara senjata nuklir memiliki konsekuensi negatif untuk stabilitas global, regional, dan semenanjung. Amerika Serikat harus mengejar strategi Korea Utara yang komprehensif untuk mencegah proliferasi horizontal, memblokir proliferasi vertikal, dan menekan untuk denuklirisasi.

Untuk masalah ini, penulis menyarankan untuk pertemuan yang lebih intens dengan Tiongkok sebelum benar-benar menghadapi Korea Utara dengan

nuklirnya. Dalam pertemuan itu seharusnya diisi dengan penjabaran-penjabaran betapa urgensinya Amerika Serikat menambahkan jumlah personel tentara mereka di Jepang dan Korea Selatan. Selain itu, pertemuan ini juga harus diisi dengan penjabaran Amerika Serikat bahwa dengan adanya *arms race* di kawasan Asia Timur mengakibatkan Amerika Serikat tidak fokus dalam menangani nuklir Korea Utara. Dan hal terakhir yang harus dibahas di pertemuan ini adalah betapa pentingnya untuk menjelaskan kepada Tiongkok kalau denuklirisasi untuk saat ini lebih penting dibanding keamanan dan stabilitas Asia Timur.

Amerika Serikat dan sekutunya harus meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan-kemungkinan Korea Utara melakukan *transfer of technology* senjata nuklir dan memperkuat kapasitas untuk melakukan langkah-langkah kontraproliferasi yang efektif. Upaya ini memang membutuhkan koordinasi yang lebih besar dan langkah-langkah yang lebih intrusif terhadap Korea Utara.

